



Kalurahan Direformasi agar Mandiri

JOGJA—Pemda DIY akan mendorong kalurahan di Bumi Mataram berkembang menjadi mandiri berdasarkan potensi khas masing-masing.

Suarasono
suarasono@harianjogja.com

Pemetaan terhadap kalurahan yang akan direformasi ini melibatkan tim yang terdiri atas personel dari Bappeda, Pamiradya, Biro Pemerintahan, Biro Pemberdayaan Masyarakat, dan kabupaten dan kota, kapanewon hingga kalurahan.

"Ada tim tersendiri yang akan metetakan dengan melibatkan semua level," katanya usai rapat paripurna di DPRD DIY, Selasa (9/8).

Aji menambahkan reformasi ini akan dilakukan dari sisi birokrasi, pemerintahan harus efektif, serta visi misi harus sejalan dengan visi misi Gubernur DIY. Selain itu, pemerintahan kalurahan harus bisa berjalan baik menjalankannya bersama BPD di kalurahan setempat.

Kemudian untuk pengembangan potensi desa akan lebih dimaksimalkan dari yang saat ini sudah berjalan, sehingga dari potensi itu desa bisa memperoleh pendapatan secara mandiri. "Kemudian potensi desa akan kami berikan dukungan. Supaya desa ini makin mandiri, *ora nggantunke* [tidak bergantung] pada pendapatan dari danais," katanya.

Ia memcontohkan saat ini masih banyak desa yang menyewakan lahannya untuk investor. Ke depan diupayakan agar dikelola kalurahan sendiri secara profesional untuk kepentingan masyarakat.

Menurutnya reformasi harus dilakukan karena perkembangan kebutuhan selalu berubah, sehingga ketika di kalurahan melakukan tugas saat ini tetapi masih menggunakan model masa lalu maka akan ketinggalan. "Kami reformasi kalurahan baik dari sisi SDM maupun struktur dan lembaganya," ujarnya.

Baskara Aji mengatakan dengan ada reformasi dan penataan, berbagai pengelolaan anggaran termasuk dana keistimewaan yang mengucur ke kalurahan lebih efektif.

"Prinsipnya danais untuk kesejahteraan masyarakat, kalau memang yang dibutuhkan di level kabupaten ya kabupaten yang menyerap bukan dari kalurahan. Tetapi

Hal itu akan menjadi program tindak lanjut dari visi misi Gubernur DIY periode 2022-2027.

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan saat menyusun visi misi untuk Gubernur DIY periode 2022-2027, Pemda DIY sebenarnya sudah mulai menata potensi yang ada di setiap kalurahan. Pemetaan itu dilakukan untuk menentukan

kalau memang levelnya kalurahan ya kalurahan yang menyerap," ucapnya.

Kesejahteraan Masyarakat

Ketua Apdesi DIY Rustam Fatoni mendukung visi misi Gubernur DIY periode 2022-2027 yang salah satunya memprioritaskan reformasi kalurahan. Hal ini menurutnya sangat sejalan dengan semangat UU Desa bahwa desa dituntut untuk mandiri. Dengan adanya perhatian Gubernur DIY secara khusus terhadap kalurahan, tentu ke depan akan semakin kuat dalam memberikan layanan ke masyarakat.

"Kami mendukung, karena visi misi bapak Gubernur ini sejalan juga dengan Undang-Undang Desa yang muaranya adalah untuk kemandirian desa. Artinya kami akan lebih diperhatikan ke depan dengan adanya komitmen dari Bapak Gubernur ini," katanya, Selasa.

Ia membaca sinyal reformasi kalurahan ini sebagai sesuatu kebijakan yang positif yang muaranya untuk kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di level kalurahan. Tentu ke depan kalurahan harus sudah mulai bersiap dengan sejumlah kebijakan tersebut.

Rustam Fatoni menambahkan dengan adanya reformasi kalurahan, harapannya danais akan lebih banyak lagi menasar masyarakat di level kalurahan. Selama ini Danais memang sudah terukur hingga ke kalurahan, namun belum sepenuhnya merata karena dalam penggunaan danais ada juklak dan juknis yang tidak sederhana.

Beri Catatan

Sementara itu, seluruh Fraksi di DPRD DIY memberikan sejumlah catatan dalam menanggapi visi misi Gubernur DIY periode 2022-2027 dalam rapat paripurna, Selasa. Selain percepatan pembangunan infrastruktur di selatan, legislatif juga sepakat dengan prioritas reformasi kalurahan.

langkah apa yang harus dilakukan sebagai tindak lanjut reformasi kalurahan.

Pemetaan potensi itu akan menjadi bekal dalam merancang program di kalurahan tersebut. Jika sebuah kalurahan memiliki potensi wisata, bisa dijadikan sebagai kalurahan wisata.

▶ Halaman 10

Juru Bicara Fraksi PDIP, Andriyana Wulandani, menilai pemilihan kawasan selatan sebagai prioritas pembangunan sebaiknya diletakkan dalam konsep pembangunan masyarakat seutuhnya. Mengingat di tengah dan utara DIY memiliki karakter dan kondisi yang berbeda dan ada keterkaitan kontribusi terhadap pembangunan kawasan selatan dan masyarakat secara umum.

Pembangunan infrastruktur seperti JILS dan pelabuhan sebagai jalur distribusi ekonomi harus segera direalisasikan agar kemanfaatan ekonomi dapat dirasakan masyarakat. "Selain infrastruktur, Pemerintah DIY juga perlu membangun kualitas sumber daya manusia terutama dari aspek sosial budaya sehingga selaras dengan konsep *Among Tani Dugang Layar* serta responsif terhadap teknologi informasi guna menjawab tantangan era saat ini," katanya.

Juru Bicara Fraksi Nasdem-PSI-PD, Widi Sutikno, sepakat dengan reformasi kalurahan sebagai ujung tombak pembangunan. Ketimpangan pembangunan antarkalurahan harus menjadi perhatian; Fraksi ini mengusulkan agar Kalurahan masuk dalam koordinasi langsung di bawah Pemda DIY untuk mengurus dana keistimewaan agar lebih profesional.

"Untuk itu perlu dukungan dari dana keistimewaan yang dianggarkan di masing-masing kalurahan dengan porsi yang memadai," katanya. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DIY, Rani Widayati, menyatakan prioritas pembangunan kawasan DIY bagian selatan perlu diselaraskan dengan pembangunan di kawasan tengah dan utara agar tidak mengakibatkan ketimpangan baru dalam lima tahun ke depan. Program pengentasan kemiskinan di tingkat kalurahan tetap melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengedepankan sasaran, target dan dampak yang terukur serta tepat sasaran.

▶ Pemda DIY sebenarnya sudah mulai menata potensi yang ada di setiap kalurahan.

▶ Ketua Apdesi DIY Rustam Fatoni mendukung visi misi Gubernur DIY periode 2022-2027 yang salah satunya memprioritaskan reformasi kalurahan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005